

TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KESEHATAN DAN
DOKTER ATAS KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KTD)
DI RUMAH SAKIT DR. KARIADI SEMARANG**



Oleh :

**A. DYAH MARHAENI ARINTAWATI, S.H
NIM : 21.C2.0064**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA**

2026

LAPORAN TESIS

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KESEHATAN DAN

DOKTER ATAS KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KTD)

DI RUMAH SAKIT DR. KARIADI SEMARANG

Diajukan Dalam Rangka Memenuhi
Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum Kesehatan



Oleh:

A. DYAH MARHAENI ARINTAWATI, S.H
NIM : 21.C2.0064

PROGRAM STUDI

MAGISTER HUKUM KESEHATAN

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

2026

ABSTRAK

Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang dijamin UUD 1945 sehingga penyelenggaraan pelayanan kesehatan harus menjamin keselamatan pasien, mutu pelayanan, dan kepastian hukum bagi tenaga kesehatan. Dalam praktik pelayanan di Rumah Sakit Dr. Kariadi Semarang masih terdapat potensi terjadinya kejadian tidak diharapkan (KTD) yang menimbulkan persoalan hukum bagi dokter dan perawat akibat belum optimalnya pengaturan *patient safety*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan mengenai *patient safety*, pelaksanaan penanganan KTD, dan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada dokter serta perawat dalam penanganan KTD di RSUP Dr. Kariadi Semarang.

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, karena penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti lapangan dan bahan-bahan hukum. Adapun dalam penelitian ini telah melaksanakan wawancara kepada sembilan (9) narasumber yang merupakan tenaga medis dan kesehatan di RSUP Dr. Kariadi Semarang serta satu (1) orang yang merupakan pasien yang pernah mengalami KTD di RSUP Dr. Kariadi Semarang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan *patient safety* di RSUP Dr. Kariadi Semarang dilaksanakan melalui pengaturan nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, serta diinternalisasikan melalui Keputusan Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi Nomor HK.02.02/I.V/828/2022 tentang Pedoman Keselamatan Pasien. Penanganan Kejadian Tidak Diharapkan (KTD) telah berjalan sesuai prinsip keselamatan pasien, ditunjukkan melalui respons klinis dan manajerial yang terstruktur, pelaporan insiden dalam 2×24 jam, klasifikasi risiko sedang, serta tindak lanjut berbasis pendekatan *non-blaming* yang berorientasi pada pemenuhan hak pasien. Perlindungan hukum terhadap dokter dan perawat terlaksana secara fungsional pada aspek preventif melalui penerapan standar profesi, SOP, dan sistem keselamatan pasien sehingga KTD diposisikan sebagai risiko medis dalam praktik pelayanan kesehatan. Pada sisi lain, pengaturan perlindungan hukum represif belum diakomodasi secara eksplisit dalam regulasi internal rumah sakit, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi tenaga kesehatan.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Kejadian Tidak Diharapkan, *Plebitis*.

ABSTRACT

Health is a human right guaranteed by the 1945 Constitution so that the implementation of health services must ensure patient safety, service quality, and legal certainty for health workers. In service practice at Dr. Kariadi Hospital Semarang, there is still the potential for unexpected events (UE) that cause legal problems for doctors and nurses due to the lack of optimal patient safety arrangements. This study aims to analyze the regulation of patient safety, the implementation of UE treatment, and the form of legal protection provided to doctors and nurses in the treatment of UE at Dr. Kariadi Semarang Hospital.

The approach in this study uses an empirical juridical method, because this research is carried out by researching the field and legal materials. In this study, interviews have been conducted with nine (9) resource persons who are medical and health personnel at Dr. Kariadi Semarang Hospital and one (1) person who is a patient who has experienced UE at Dr. Kariadi Semarang Hospital.

The results of the study show that patient safety arrangements at Dr. Kariadi Hospital Semarang are carried out through national regulations based on Law Number 17 of 2023 concerning Health and Government Regulation Number 28 of 2024, and internalized through the Decree of the President Director of Dr. Kariadi Hospital Number HK.02.02/I.V/828/2022 concerning Patient Safety Guidelines. The handling of Unexpected Events (UE) has been carried out in accordance with the principles of patient safety, demonstrated through structured clinical and managerial responses, incident reporting within 2×24 hours, classification of moderate risks, and follow-up based on a non-blaming approach oriented towards the fulfillment of patient rights. Legal protection for doctors and nurses is carried out functionally in the preventive aspect through the implementation of professional standards, SOPs, and patient safety systems so that UE is positioned as a medical risk in health service practice. On the other hand, repressive legal protection arrangements have not been explicitly accommodated in hospital internal regulations, which has the potential to create legal uncertainty for health workers.

Keywords: Legal Protection, Unexpected Events, Plebitis.